

Abstrak

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Samosir merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Samosir untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip netralitas aparatur negara selama tahapan pemilihan. Pokja ini dibentuk sebagai wadah koordinasi, pengawasan, pencegahan, serta penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri guna menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi.

Melalui pelaksanaan pengawasan yang terstruktur, Pokja bertugas melakukan pemetaan kerawanan, sosialisasi ketentuan netralitas, pemantauan aktivitas aparatur negara, serta tindak lanjut terhadap informasi atau laporan dugaan pelanggaran. Selain itu, Pokja juga memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN, TNI, dan Polri.

Keberadaan Pokja Pengawasan Netralitas di Kabupaten Samosir diharapkan mampu mencegah terjadinya keberpihakan aparatur negara kepada peserta pemilihan, menjaga profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung terwujudnya Pemilihan Tahun 2024 yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.